

EVALUASI IMPLEMENTASI SAK EMKM PADA CV SAYAP KEBEBASAN ABADI

Nisa Suryani*¹, Rudolf Hizkia Simangunsong¹, Sekar Oktaviola Sendin¹, Windi Untari¹, Rimi Gusliana Mais²

Mahasiswa Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta Dosen Akuntansi,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta

Email: nisasuryanichayoung14@gmail.com, rimi_gusliana@stei.ac.id

Abstrak

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) disusun untuk menyediakan pedoman pencatatan keuangan yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai karakteristik UMKM di Indonesia (IAI, 2020). Meskipun demikian, implementasi SAK EMKM pada perusahaan kecil masih banyak mengalami kendala, termasuk minimnya sumber daya akuntansi, pemahaman standar, dan integrasi dengan kebutuhan pelaporan internal. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM belum mampu menerapkan standar secara optimal karena keterbatasan literasi dan kemampuan teknis (Hapsari & Wulandari, 2022). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi SAK EMKM pada CV Sayap Kebebasan Abadi dengan menelaah kesesuaian pencatatan akuntansi perusahaan terhadap standar yang berlaku.

Kata kunci: SAK EMKM, UMKM, laporan keuangan, mahasiswa akuntansi, evaluasi implementasi.

Abstract

The Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM) were developed to provide simple, easy-to-understand accounting guidelines tailored to the characteristics of MSMEs in Indonesia (IAI, 2020). However, the implementation of SAK EMKM in small enterprises still faces various challenges, including limited accounting resources, inadequate understanding of the standards, and difficulties in integrating them into internal reporting needs. Research shows that most MSMEs are unable to apply the standards optimally due to limited literacy and technical capability (Hapsari & Wulandari, 2022). This study aims to evaluate the implementation of SAK EMKM at CV Sayap Kebebasan Abadi by examining the conformity of the company's accounting records with the applicable standards.

Keywords: SAK EMKM, MSMEs, financial statements, accounting students, implementation evaluation.

Article History

Received: December 2025
Reviewed: December 2025
Published: December 2025

Plagirism checker no 1560
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Standar akuntansi memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat dibandingkan. **Idealnya**, penerapan standar seperti SAK EMKM membuat UMKM mampu menyusun laporan keuangan yang tertib, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, **realitas** di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih menghadapi kendala administratif dan teknis dalam memahami serta menerapkan standar tersebut secara konsisten. Sejak diterbitkannya SAK EMKM pada tahun 2020, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menegaskan bahwa standar ini hadir sebagai solusi bagi UMKM yang membutuhkan pedoman pencatatan sederhana namun tetap memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum (IAI, 2020). UMKM sendiri merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja. Akan tetapi, mayoritas pelaku UMKM masih mengalami keterbatasan kapasitas administratif, terutama dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar. Fenomena ketimpangan antara **idealitas standar dan realitas praktik** inilah yang menjadikan implementasi SAK EMKM sebagai isu penting untuk diteliti. CV Sayap Kebebasan Abadi, sebuah entitas perdagangan, menjadi contoh kasus yang dianalisis untuk melihat sejauh mana standar tersebut diterapkan dan bagaimana praktik akuntansi UMKM berlangsung secara nyata.

Permasalahan umum yang sering dihadapi UMKM dalam implementasi SAK EMKM meliputi kurangnya pelatihan, pencatatan yang masih berbasis kas, pemisahan aset pribadi dan perusahaan yang belum disiplin, serta ketidakmampuan menyiapkan catatan atas laporan keuangan. Kondisi ini sejalan dengan temuan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih kesulitan menerapkan standar akuntansi meskipun standar tersebut telah disederhanakan (Widiyanti, 2020). Walaupun demikian, sebagian besar studi sebelumnya hanya berfokus pada tingkat pemahaman pelaku UMKM atau hambatan implementasi, bukan pada evaluasi nyata penerapan SAK EMKM pada entitas kecil tertentu secara mendalam. Selain itu, penelitian yang menggabungkan perspektif evaluasi akuntansi praktis dengan perspektif pedagogis yakni bagaimana studi kasus UMKM dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran mahasiswa masih sangat terbatas (Arianti & Pratiwi, 2021). Inilah **research gap** yang ingin dijawab oleh penelitian ini.

Penelitian ini **bertujuan** memberikan evaluasi komprehensif mengenai penerapan SAK EMKM pada CV Sayap Kebebasan Abadi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan praktik akuntansi yang dilakukan perusahaan, serta menjelaskan nilai edukatif studi kasus tersebut bagi mahasiswa. Melalui penelaahan terhadap dokumen makalah kelompok 8, penelitian ini **menghasilkan** temuan bahwa perusahaan telah menjalankan sebagian instrumen dasar SAK EMKM seperti pencatatan transaksi dan penyajian laporan keuangan sederhana, tetapi belum sepenuhnya memenuhi ketentuan seperti pemisahan aset pribadi-entitas, penyusunan catatan atas laporan keuangan, dan pengukuran aset tetap sesuai standar. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan implementasi yang dapat menjadi titik refleksi bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan mereka.

Penelitian ini menjadi **penting** karena menegaskan bahwa keberhasilan implementasi standar akuntansi bukan hanya bergantung pada penyederhanaan standar, tetapi juga pada kapasitas sumber daya manusia, literasi keuangan, dan pendampingan teknis. Selain itu, dari perspektif akademik, penggunaan studi kasus UMKM seperti CV Sayap Kebebasan Abadi memberikan manfaat pedagogis signifikan,

karena mahasiswa dapat memahami secara langsung bagaimana pencatatan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan diterapkan dalam konteks riil, bukan hanya secara teoretis. Penelitian ini juga berkontribusi memberikan gambaran empiris mengenai implementasi SAK EMKM pada entitas kecil serta menyediakan model pembelajaran berbasis kasus yang dapat digunakan dosen dan mahasiswa dalam memperkuat kompetensi akuntansi praktis.

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih adanya kesenjangan nyata antara regulasi akuntansi yang telah dirancang secara sederhana melalui SAK EMKM dengan praktik pencatatan keuangan yang dilakukan oleh pelaku UMKM di lapangan. Meskipun SAK EMKM telah berlaku hampir satu dekade, banyak UMKM termasuk CV Sayap Kebebasan Abadi masih menjalankan praktik akuntansi secara informal, berbasis kebiasaan, dan berorientasi pada kebutuhan jangka pendek, seperti penghitungan laba kas dan pengendalian arus uang harian. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan standar akuntansi belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai alat pengelolaan dan pengambilan keputusan bisnis, melainkan masih dipandang sebagai kewajiban administratif semata. **Fenomena** ini menjadi semakin relevan ketika UMKM dituntut untuk memiliki laporan keuangan yang andal dalam rangka akses pembiayaan, kepatuhan perpajakan, dan keberlanjutan usaha.

Kontribusi utama kelompok dalam penelitian ini terletak pada pendekatan evaluatif berbasis studi kasus nyata UMKM yang dianalisis secara sistematis menggunakan kerangka SAK EMKM. Kelompok tidak hanya mengidentifikasi tingkat kepatuhan dan penyimpangan praktik akuntansi CV Sayap Kebebasan Abadi, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks keterbatasan sumber daya dan karakteristik operasional entitas kecil. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi pedagogis dengan menjadikan makalah kelompok sebagai media pembelajaran berbasis kasus, yang memungkinkan mahasiswa memahami penerapan standar akuntansi secara konkret, kritis, dan reflektif. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi ganda, yaitu memperkaya literatur empiris mengenai implementasi SAK EMKM pada UMKM serta menyediakan model pembelajaran aplikatif yang menjembatani kesenjangan antara teori akuntansi dan praktik di dunia usaha kecil.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang berfokus pada implementasi SAK EMKM pada CV Sayap Kebebasan Abadi sebagaimana didokumentasikan dalam Makalah Kelompok 8. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik akuntansi yang diterapkan oleh entitas mikro dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku, sebagaimana dianjurkan dalam penelitian sebelumnya mengenai efektivitas pendekatan kualitatif untuk menganalisis praktik UMKM (Arianti & Pratiwi, 2021). **Objek penelitian** dalam studi ini adalah proses penyusunan dan penerapan laporan keuangan berbasis SAK EMKM pada CV Sayap Kebebasan Abadi, sedangkan subjek penelitian meliputi dokumen-dokumen laporan keuangan, catatan transaksi, serta analisis makalah yang disusun mahasiswa sebagai bagian dari studi kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder, berupa laporan posisi keuangan sederhana, laporan laba rugi, bukti transaksi, dan catatan analisis kelompok yang telah disusun dalam konteks pembelajaran. Penggunaan data sekunder ini relevan dengan temuan Firmansyah dan Hidayat (2020) yang

menekankan pentingnya evaluasi dokumen riil UMKM dalam menilai kepatuhan terhadap SAK EMKM.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu pengumpulan seluruh laporan keuangan, catatan transaksi, dan berkas pendukung dari CV Sayap Kebebasan Abadi yang tersedia dalam Makalah Kelompok 8. Seluruh dokumen dianalisis menggunakan **teknik analisis data**, yaitu membandingkan setiap komponen laporan keuangan perusahaan dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Pendekatan analisis konten ini sejalan dengan metode yang digunakan oleh Putri dan Sulistyowati (2021), yang turut menilai kesesuaian laporan UMKM berdasarkan struktur standar. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap utama: pertama, identifikasi elemen laporan keuangan yang telah disusun perusahaan; kedua, pemeriksaan tingkat kesesuaian elemen-elemen tersebut dengan standar, terutama terkait laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan; dan ketiga, evaluasi kesenjangan antara praktik perusahaan dan ketentuan yang seharusnya berlaku. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi perspektif pedagogis dengan menilai bagaimana studi kasus ini dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa akuntansi, sesuai dengan penelitian Rahmawati (2020) yang menunjukkan bahwa penggunaan studi kasus mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konteks akuntansi praktis. Dengan demikian, analisis tidak hanya berfokus pada aspek teknis kepatuhan standar tetapi juga mempertimbangkan nilai edukatif penggunaan kasus nyata dalam pembelajaran akuntansi, sebagaimana ditegaskan oleh Hapsari dan Wulandari (2022) mengenai pentingnya literasi akuntansi dalam lingkungan pendidikan dan praktik UMKM.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAK EMKM pada CV Sayap Kebebasan Abadi masih berada pada tahap dasar dan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan standar yang berlaku. Perusahaan telah melakukan pencatatan transaksi keuangan terkait kas masuk dan kas keluar, pembelian persediaan, penjualan barang, serta pengeluaran operasional. Namun, pencatatan tersebut masih dilakukan secara sederhana dan belum mengacu pada struktur pelaporan keuangan sebagaimana dipersyaratkan dalam SAK EMKM. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hapsari dan Wulandari (2022) yang menyatakan bahwa banyak UMKM hanya melakukan pencatatan transaksi tanpa menyusun laporan keuangan terstruktur sesuai standar. Laporan posisi keuangan yang disusun perusahaan hanya memuat daftar kasar aset dan kewajiban tanpa pengelompokan yang jelas sesuai karakteristik standar, terutama atribut pengungkapan terkait aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek, dan ekuitas pemilik. Misalnya, pencatatan aset tetap belum mencantumkan metode depresiasi serta umur manfaat sebagaimana diwajibkan dalam standar, sehingga nilai aset tidak mencerminkan biaya perolehan yang telah dialokasikan secara sistematis. Kondisi ini sejalan dengan temuan Putri dan Sulistyowati (2021) yang menyebutkan bahwa ketidaklengkapan pengakuan dan pengukuran aset tetap merupakan salah satu hambatan umum dalam implementasi SAK EMKM. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pencatatan perusahaan masih menekankan aspek pencatatan dasar daripada penyusunan laporan keuangan yang terstruktur.

Pada laporan laba rugi, perusahaan telah menyajikan data pendapatan dan beban, tetapi penyajian tersebut masih terbatas pada nominal total tanpa adanya pemisahan dan pengelompokan kategori beban operasional, beban administrasi, maupun beban lain-lain. Ketidadaan pemisahan ini menghambat kemampuan analitis baik bagi manajemen maupun pihak eksternal dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, tidak ditemukannya kebijakan pengakuan pendapatan dan pengukuran biaya dalam dokumen yang dianalisis memperlihatkan bahwa perusahaan belum memiliki landasan akuntansi yang jelas dalam menyusun laporan laba rugi. Kondisi ini sesuai dengan temuan Firmansyah dan Hidayat (2020) yang menjelaskan bahwa banyak UMKM menyusun laporan laba rugi secara sederhana, tanpa mengikuti prinsip pengakuan pendapatan dan beban yang diatur standar. Situasi ini mempertegas bahwa perusahaan lebih menggunakan pendekatan praktis dibandingkan pendekatan berbasis standar akuntansi.

Sementara itu, Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) menjadi aspek yang paling rendah tingkat implementasinya. CV Sayap Kebebasan Abadi tidak menyusun CALK sesuai persyaratan SAK EMKM, di mana standar mengharuskan adanya deskripsi kebijakan akuntansi penting, penjelasan metode penilaian persediaan, rincian aset tetap, serta pengungkapan informasi signifikan lainnya. Ketidadaan CALK membuat laporan keuangan perusahaan tidak mampu memberikan konteks dan penjelasan yang cukup atas angka-angka dalam laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi. Penelitian Arianti dan Pratiwi (2021) juga menemukan bahwa penyusunan CALK merupakan komponen yang paling sulit diterapkan oleh UMKM karena minimnya pemahaman dan pelatihan. Kurangnya pengetahuan akuntansi dan minimnya pelatihan diduga menjadi penyebab utama ketidakhadiran CALK dalam laporan perusahaan.

Persediaan sebagai bagian penting dalam perusahaan dagang juga belum dinilai secara konsisten sesuai dengan ketentuan standar. Tidak ditemukan informasi terkait apakah perusahaan menggunakan metode biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, padahal SAK EMKM mensyaratkan penggunaan nilai yang lebih rendah antara keduanya. Kelemahan dalam penilaian persediaan tidak hanya mempengaruhi laporan posisi keuangan tetapi juga berdampak langsung pada perhitungan harga pokok penjualan dan laba bersih. Kondisi serupa ditemukan pada akun ekuitas, di mana tidak terdapat pemisahan jelas antara modal pemilik dan transaksi pribadi pemilik. Temuan ini konsisten dengan penelitian Rahmawati (2020) yang menegaskan bahwa pemilik UMKM sering mencampurkan aset pribadi dengan aset perusahaan sehingga menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan prinsip entitas bisnis.

Berdasarkan analisis keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa implementasi SAK EMKM pada CV Sayap Kebebasan Abadi masih belum optimal dan memerlukan peningkatan signifikan. Namun demikian, kasus ini memiliki nilai edukatif yang tinggi bagi mahasiswa akuntansi. Melalui studi kasus ini, mahasiswa dapat mengamati secara langsung kesenjangan antara teori standar akuntansi dan praktik yang terjadi di lapangan. Studi kasus memberikan kesempatan untuk menilai bagaimana laporan keuangan UMKM disusun, apa saja kelemahannya, serta bagaimana standar dapat diterapkan untuk memperbaiki kualitas pelaporan. Hal ini diperkuat oleh Hadi dan Puspitasari (2022) yang menjelaskan bahwa penggunaan studi kasus nyata dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang penerapan standar akuntansi. Dengan demikian, kasus CV Sayap Kebebasan Abadi tidak hanya berfungsi sebagai objek evaluasi, tetapi juga sebagai contoh nyata yang memperkaya proses pembelajaran akuntansi keuangan berbasis SAK EMKM.

Perbedaan SAK EMKM dan SAK ETAP

SAK EMKM dan SAK ETAP merupakan dua standar akuntansi yang sama-sama ditujukan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik, namun keduanya memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda. SAK EMKM disusun khusus untuk entitas mikro, kecil, dan menengah yang memiliki kapasitas pencatatan terbatas, sehingga standar ini sangat sederhana dan hanya mencakup tiga laporan utama, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan dengan pengungkapan minimal (IAI, 2020). Pengukuran dalam SAK EMKM sepenuhnya berbasis biaya historis dan tidak mengakomodasi metode kompleks seperti nilai wajar, revaluasi, penurunan nilai, atau instrumen keuangan. Berbeda dengan itu, SAK ETAP digunakan untuk entitas kecil hingga menengah yang memiliki kegiatan usaha lebih kompleks dibandingkan UMKM mikro. SAK ETAP mencakup lebih banyak ruang lingkup, seperti pengakuan aset tetap dengan opsi revaluasi, amortisasi aset takberwujud, penurunan nilai, penyajian laporan perubahan ekuitas, hingga ketentuan lebih rinci mengenai transaksi bisnis (Sari & Taufik, 2021). Selain itu, SAK ETAP mensyaratkan pengungkapan yang lebih luas dan detail dibandingkan SAK EMKM, termasuk kebijakan akuntansi dan rincian akun tertentu (Pratama, 2022). Dengan demikian, SAK EMKM lebih mudah diterapkan oleh pelaku UMKM dengan keterbatasan SDM dan pemahaman akuntansi, sementara SAK ETAP ditujukan bagi entitas yang memerlukan pelaporan lebih lengkap namun tetap lebih sederhana dibandingkan PSAK penuh. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yunita dan Hidayat (2023) yang menegaskan bahwa pemilihan standar akuntansi harus mempertimbangkan tingkat kompleksitas usaha, serta penelitian Mutmainah (2020) yang menyatakan bahwa SAK EMKM memberikan kemudahan signifikan bagi UMKM dalam penyusunan laporan keuangan.

Studi Kasus - Analisis Implementasi SAK ETAP dan SAK EMKM Pada CV Sayap Kebebasan Abadi

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan bagian finance CV Sayap Kebebasan Abadi, diketahui bahwa perusahaan masih belum menerapkan SAK ETAP maupun SAK EMKM secara menyeluruh. Pegawai finance menyampaikan bahwa mereka bahkan “tidak mengetahui apa itu SAK EMKM secara keseluruhan,” sehingga pencatatan akuntansi dilakukan hanya berdasarkan jurnal umum dan kebiasaan pencatatan sederhana yang selama ini berlaku. Kondisi ini konsisten dengan temuan Mutmainah (2020), yang menyatakan bahwa rendahnya literasi akuntansi merupakan faktor utama UMKM belum mampu menerapkan standar pelaporan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih menggunakan sistem pencatatan konvensional tanpa acuan standar akuntansi yang jelas, sebagaimana juga ditemukan oleh Pratama (2022) bahwa sebagian besar entitas kecil masih mengandalkan pencatatan manual tanpa memahami struktur standar akuntansi. CV ini juga berstatus sebagai non-PKP, sehingga pencatatannya sangat sederhana dan hanya berfokus pada pemasukan, pengeluaran, serta hutang-piutang. Fenomena ini sejalan dengan hasil penelitian Yunita dan Hidayat (2023) yang menunjukkan bahwa entitas non-PKP cenderung melakukan pencatatan minimalis karena tidak memiliki kewajiban pelaporan pajak yang kompleks. Kondisi tersebut menggambarkan keterbatasan literasi akuntansi internal yang berdampak pada ketidaksesuaian dengan standar pelaporan keuangan yang seharusnya diterapkan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik, sebagaimana juga ditegaskan oleh Sari dan Taufik (2021) bahwa pemahaman SDM menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi SAK ETAP maupun SAK EMKM.

Laporan Posisi Keuangan

CV Sayap Kebebasan

Periode 2024

AKTIVA		PASIVA	
Aktiva Lancar		Kewajiban	
Kas dan Setara Kas	293.578.205	Utang Usaha	1.370.742.228
Piutang Usaha	1.458.236.413	Beban Sewa Perlu Dibayar	
Biaya Sewa Dibayar di Muka		Utang Pajak	
Aset Lancar Lainnya		Kewajiban Lancar Lainnya	
TOTAL	1.751.814.618	TOTAL	1.370.742.228
Aktiva Tetap		Ekuitas	
Peralatan	10.000.000	Modal Pemilik	250.000.000
Inventaris		Prive	
Akm. Penyusutan	2.500.000	Laba Ditahan	143.572.390
TOTAL	12.500.000	TOTAL	393.572.390
TOTAL AKTIVA	1.764.314.618	TOTAL PASIVA	1.764.314.618

Dari data wawancara juga terlihat bahwa posisi piutang dalam laporan keuangan CV sebagian besar timbul karena kegiatan operasional perusahaan yang bekerja sebagai vendor untuk perusahaan lain, khususnya proyek yang berkaitan dengan pekerjaan pemerintah menjelang akhir tahun. Pembayaran atas pekerjaan tersebut biasanya diterima pada bulan Januari, sehingga finance memasukkan nilai tersebut sebagai piutang usaha dalam laporan posisi keuangan. Hal ini sesuai dengan praktik umum UMKM yang memiliki siklus kas tertunda terutama dalam transaksi dengan instansi pemerintah, sebagaimana dijelaskan oleh Wijayanti dan Putra (2020) bahwa proyek pemerintah sering menyebabkan keterlambatan pembayaran sehingga piutang UMKM cenderung menumpuk di akhir periode. Dalam laporan keuangan perusahaan, tercatat Piutang Usaha sebesar Rp 1.458.236.413. Pengakuan ini sudah mendekati prinsip akrual pada SAK ETAP, tetapi belum sepenuhnya tepat karena perusahaan tidak membuat dokumentasi pendukung yang memadai mengenai umur piutang, klasifikasi, maupun kebijakan pengakuannya. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Pratama (2022) yang menemukan bahwa banyak UMKM hanya mencatat nominal piutang tanpa melakukan analisis umur piutang atau penilaian kualitas piutang. Selain itu, Mutmainah (2020) menegaskan bahwa ketidaklengkapan dokumentasi dan lemahnya kebijakan akuntansi merupakan hambatan utama dalam penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada UMKM. Padahal, sebagaimana disampaikan oleh Yunita dan Hidayat (2023), pengungkapan piutang yang memadai merupakan komponen penting dalam menilai likuiditas dan kesehatan keuangan entitas kecil. Dengan demikian, meskipun perusahaan telah mulai menerapkan konsep akrual, ketidaksesuaian dokumentasi menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan belum memenuhi ketentuan pelaporan SAK ETAP maupun SAK EMKM sebagaimana semestinya.

Laba Rugi**CV Sayap Kebebasan**

Periode 2024

Pendapatan		
Pendapatan		2.610.407.095
Jumlah Pendapatan		2.610.407.095
Beban project		2.387.282.669
Laba Kotor		223.124.426
Beban/ Kewajiban		
Beban Gaji		56.000.000
Beban Listrik		4.000.000
Beban Sewa		6.500.000
Beban Penyusutan		2.500.000
Total Beban:		66.500.000
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK		156.624.426
PAJAK		13.052.035
LABA/ RUGI BERSIH		143.572.390

Selain itu, berdasarkan pernyataan bahwa perusahaan “hanya mencatat transaksi masuk dan keluar saja,” terlihat bahwa laporan keuangan yang dihasilkan masih bersifat cash basis. Laporan laba rugi yang diunggah menunjukkan pola pencatatan sederhana, yakni total pendapatan sebesar Rp 2.610.407.095, beban proyek sebesar Rp 2.387.282.669, dan laba bersih sebesar Rp 143.572.390. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa perusahaan hanya menyusun laporan keuangan untuk kebutuhan internal dan permintaan mitra kerja, bukan untuk memenuhi standar akuntansi tertentu. Pada bagian aktiva tetap, CV mencatat peralatan senilai Rp 10.000.000 dan akumulasi penyusutan Rp 2.500.000. Meski pencatatan ini mencerminkan adanya upaya mengikuti SAK ETAP/EMKM, wawancara menunjukkan bahwa pencatatan dilakukan tanpa dasar pemahaman tentang ketentuan penyusutan menurut standar. Hal ini memperjelas bahwa perusahaan mengikuti langkah pencatatan teknis, tetapi tidak memahami standar yang mendasarinya.

Keterbatasan SDM juga menjadi faktor penyebab ketidaksesuaian implementasi standar, karena CV hanya memiliki empat karyawan tetap dan harus menggunakan tenaga outsourcing untuk aktivitas tertentu. Kondisi ini menyebabkan pencatatan keuangan tidak sistematis dan tidak terdokumentasi dengan baik. Perusahaan juga tidak memiliki sistem akuntansi yang terintegrasi, sehingga proses pencatatan dilakukan secara manual dan sangat bergantung pada pengetahuan dasar finance. Sejalan dengan informasi wawancara bahwa pencatatan “per transaksi saja yang masuk dan keluar,” dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan CV Sayap Kebebasan Abadi masih bersifat single-entry, bukan double-entry sebagaimana disyaratkan dalam SAK. Secara keseluruhan, analisis terhadap hasil wawancara dan dokumen laporan keuangan menunjukkan bahwa implementasi SAK ETAP dan SAK EMKM pada CV Sayap Kebebasan Abadi masih sangat minim. Perusahaan belum memenuhi prinsip dasar standar seperti pengakuan akrual, klasifikasi akun, pengungkapan yang memadai, hingga penyusunan catatan atas laporan keuangan. Studi kasus ini memberikan gambaran nyata bahwa masih banyak UMKM atau CV kecil yang menyusun laporan keuangan hanya berdasarkan kebiasaan, bukan standar akuntansi.

Untuk melihat permasalahan ini secara lebih kritis, penting ditekankan bahwa ketidaksesuaian penerapan standar akuntansi bukan hanya persoalan teknis pencatatan, tetapi juga menunjukkan lemahnya struktur tata kelola dan minimnya

kesadaran manajemen terhadap pentingnya pelaporan keuangan yang akurat dan dapat diaudit. Ketergantungan pada pencatatan sederhana dan kebiasaan lama menciptakan risiko informasi yang bias, salah saji material, dan ketidakmampuan perusahaan menilai kondisi keuangannya sendiri secara objektif. Selain itu, absennya dokumentasi pendukung, kebijakan akuntansi, dan kontrol internal dasar dapat berdampak langsung pada kepercayaan pihak luar, seperti mitra bisnis, lembaga pendanaan, atau auditor, yang membutuhkan laporan keuangan berbasis standar untuk menilai kinerja dan kesehatan perusahaan.

Jika kondisi ini terus berlanjut, perusahaan berpotensi menghadapi hambatan dalam ekspansi bisnis, kesulitan memperoleh pendanaan, serta risiko kesalahan keputusan manajerial akibat data keuangan yang tidak mencerminkan realitas ekonomi secara tepat. Oleh karena itu, penerapan SAK ETAP atau SAK EMKM bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan strategis untuk meningkatkan profesionalitas, transparansi, dan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Perubahan ini membutuhkan komitmen manajemen untuk membangun sistem akuntansi yang lebih baik, memperkuat kapasitas SDM, dan memastikan bahwa proses pelaporan keuangan tidak lagi bersifat administratif semata, melainkan menjadi instrumen penting dalam pengambilan keputusan bisnis yang berlandaskan data yang valid dan terpercaya.

Kesimpulan

Selain itu, berdasarkan pernyataan bahwa perusahaan “hanya mencatat transaksi masuk dan keluar saja,” terlihat bahwa laporan keuangan yang dihasilkan masih bersifat *cash basis*. Laporan laba rugi yang diunggah menunjukkan pola pencatatan sederhana, yakni total pendapatan sebesar Rp 2.610.407.095, beban proyek sebesar Rp 2.387.282.669, dan laba bersih sebesar Rp 143.572.390. Temuan ini konsisten dengan penelitian Wijayanti dan Putra (2020) yang menyatakan bahwa sebagian besar UMKM hanya menyusun laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan internal tanpa mengacu pada standar akuntansi. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa perusahaan hanya menyusun laporan keuangan untuk kebutuhan internal dan permintaan mitra kerja, bukan untuk memenuhi standar akuntansi tertentu. Pada bagian aktiva tetap, CV mencatat peralatan senilai Rp 10.000.000 dan akumulasi penyusutan Rp 2.500.000. Meski pencatatan ini mencerminkan adanya upaya mengikuti SAK ETAP/EMKM, wawancara menunjukkan bahwa pencatatan dilakukan tanpa dasar pemahaman tentang ketentuan penyusutan menurut standar. Kondisi ini sejalan dengan hasil studi Pratama (2022) yang menemukan bahwa pemilik UMKM sering kali melakukan penyusutan hanya sebagai formalitas tanpa mengikuti metode dan ketentuan standar. Hal ini memperjelas bahwa perusahaan mengikuti langkah pencatatan teknis, tetapi tidak memahami standar yang mendasarinya, sebagaimana juga ditegaskan oleh Sari dan Taufik (2021) bahwa lemahnya pemahaman SDM menyebabkan implementasi SAK belum optimal.

Keterbatasan SDM juga menjadi faktor penyebab ketidaksesuaian implementasi standar, karena CV hanya memiliki empat karyawan tetap dan harus menggunakan tenaga outsourcing untuk aktivitas tertentu. Kondisi ini menyebabkan pencatatan keuangan tidak sistematis dan tidak terdokumentasi dengan baik. Penelitian Mutmainah (2020) menunjukkan bahwa kekurangan SDM kompeten merupakan hambatan utama UMKM dalam menerapkan SAK ETAP maupun SAK EMKM. Perusahaan juga tidak memiliki sistem akuntansi yang terintegrasi, sehingga proses

pencatatan dilakukan secara manual dan sangat bergantung pada pengetahuan dasar finance. Sejalan dengan informasi wawancara bahwa pencatatan “per transaksi saja yang masuk dan keluar,” dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan CV Sayap Kebebasan Abadi masih bersifat *single-entry*, bukan *double-entry* sebagaimana disyaratkan dalam SAK. Kondisi ini konsisten dengan studi Yunita dan Hidayat (2023) yang menemukan bahwa banyak UMKM tidak menerapkan sistem pencatatan berlapis sehingga laporan keuangannya tidak memenuhi prinsip dasar akuntansi. Secara keseluruhan, analisis terhadap hasil wawancara dan dokumen laporan keuangan menunjukkan bahwa implementasi SAK ETAP dan SAK EMKM pada CV Sayap Kebebasan Abadi masih sangat minim. Perusahaan belum memenuhi prinsip dasar standar seperti pengakuan akrual, klasifikasi akun, pengungkapan yang memadai, hingga penyusunan catatan atas laporan keuangan. Studi kasus ini memberikan gambaran nyata bahwa masih banyak UMKM atau CV kecil yang menyusun laporan keuangan hanya berdasarkan kebiasaan, bukan standar akuntansi, sebagaimana juga ditemukan oleh Hadi dan Puspitasari (2022).

Untuk melihat permasalahan ini secara lebih kritis, penting ditekankan bahwa ketidaksesuaian penerapan standar akuntansi bukan hanya persoalan teknis pencatatan, tetapi juga menunjukkan lemahnya struktur tata kelola dan minimnya kesadaran manajemen terhadap pentingnya pelaporan keuangan yang akurat dan dapat diaudit. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Rahmawati (2021) yang menyebutkan bahwa UMKM yang tidak memiliki sistem pelaporan standar menghadapi risiko *information bias*, *misstatement*, dan ketidakmampuan menilai kinerja secara objektif. Ketergantungan pada pencatatan sederhana dan kebiasaan lama menciptakan risiko informasi yang bias, salah saji material, dan ketidakmampuan perusahaan menilai kondisi keuangannya sendiri secara tepat. Selain itu, absennya dokumentasi pendukung, kebijakan akuntansi, dan kontrol internal dasar dapat berdampak langsung pada kepercayaan pihak luar, seperti mitra bisnis, lembaga pendanaan, atau auditor, yang membutuhkan laporan keuangan berbasis standar untuk menilai kinerja dan kesehatan perusahaan. Jika kondisi ini terus berlanjut, perusahaan berpotensi menghadapi hambatan dalam ekspansi bisnis, kesulitan memperoleh pendanaan, serta risiko kesalahan keputusan manajerial akibat data keuangan yang tidak mencerminkan realitas ekonomi secara tepat. Oleh karena itu, penerapan SAK ETAP atau SAK EMKM bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan strategis untuk meningkatkan profesionalitas, transparansi, dan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Perubahan ini membutuhkan komitmen manajemen untuk membangun sistem akuntansi yang lebih baik, memperkuat kapasitas SDM, dan memastikan bahwa proses pelaporan keuangan tidak lagi bersifat administratif semata, melainkan menjadi instrumen penting dalam pengambilan keputusan bisnis yang berlandaskan data yang valid dan terpercaya.

Bibliografi

- Arianti, B. F., & Pratiwi, N. L. (2021). Analisis Kesiapan UMKM dalam Implementasi SAK EMKM di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 12(2), 88-102.
- Firmansyah, D., & Hidayat, R. (2020). Penerapan SAK EMKM pada UMKM dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 8(3), 210-222.

- Hadi, S., & Puspitasari, D. (2022). Studi Kasus sebagai Metode Pembelajaran Akuntansi pada UMKM. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 20(1), 55-67.
- Hapsari, R. A., & Wulandari, D. (2022). Literasi Akuntansi UMKM dan Kesesuaian Pelaporan SAK EMKM. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 9(3), 301-312.
- IAI. (2020). *Standar Akuntansi Keuangan EMKM*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Mutmainah, S. (2020). Kendala Literasi Akuntansi dalam Implementasi SAK EMKM pada UMKM. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(4), 469-478.
- Pratama, F. R. (2022). Kesiapan UMKM dalam Menerapkan SAK ETAP dan SAK EMKM. *Jurnal Ekonomi & Keuangan*, 8(1), 45-57.
- Putri, A. K., & Sulistyowati, W. (2021). Analisis Kesesuaian Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan UMKM. *Jurnal Akuntansi Riset*, 10(2), 176-189.
- Rahmawati, L. (2021). Pengaruh Ketidaksesuaian Pelaporan Keuangan UMKM terhadap Pengambilan Keputusan. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 10(2), 145-160.
- Sari, A. M., & Taufik, M. (2021). Analisis Hambatan Penerapan SAK ETAP dan SAK EMKM pada Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 15(2), 112-124.
- Wijayanti, R., & Putra, Y. D. (2020). Tantangan Pencatatan Piutang UMKM dalam Proyek Pemerintah. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 5(2), 134-145.
- Yunita, D., & Hidayat, R. (2023). Evaluasi Implementasi Standar Akuntansi pada UMKM: Sistem Pencatatan & Pengungkapan. *Jurnal Akuntansi Terapan*, 11(3), 210-221.